



**PERANAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KASUS PT. INDOMOBIL
SUKSES INTERNASIONAL DAN PT. PERTAMINA**

TESIS

SUPRIYANTO

1320922100

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**PERANAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KASUS PT. INDOMOBIL
SUKSES INTERNASIONAL DAN PT. PERTAMINA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

SUPRIYANTO

1320922100

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Supriyanto
NRP : 1320922100
Tanggal : 19 Desember 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2015

Yang Menyatakan,



Supriyanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto
NRP : 1320922100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Hakim Terhadap Putusan Perkara Persekongkolan Tender Dalam Kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2015
Yang menyatakan,



Supriyanto

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Supriyanto
NRP : 1320922100
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Hakim Terhadap Putusan Perkara Persekongkolan
Tender Dalam Kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan
PT. Pertamina

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.,M.Hum
Ketua Penguji



Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH
Penguji Ahli



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
Penguji I



Dr. Arrisman, SH.,MH
Penguji II (Pembimbing)



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM
Direktur



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Desember 2015

PERANAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KASUS PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL DAN PT. PERTAMINA

Supriyanto

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya persekongkolan tender saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan perkara penjualan atau divestasi unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero). Serta mengetahui peranan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung terhadap putusan persekongkolan tender kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, negara hukum adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder, yang dikualifikasikan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini dirumuskan Majelis Komisi dalam perkara penjualan saham PT. IMSI dan Majelis Komisi dalam perkara divestasi VLCC PT. Pertamina sama-sama memutuskan bahwa pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. perkara penjualan saham PT. IMSI dan perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, dapat disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Negeri terhadap dua perkara tersebut tidak hanya memeriksa substansi/pokok perkara. Dari aspek *legal reasoning* Majelis Hakim menafsirkan UU Antimonopoli secara limitative, dan juga mengacu kepada ketentuan perjanjian jual beli yang diatur dalam BW. Sedangkan dalam perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, Majelis Hakim menyamakan pembuktian unsur “diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d dan unsur “bersekongkol” dalam Pasal 22 UU Antimonopoli. Begitu juga halnya dengan pembuktian unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, yang ada dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU Antimonopoli. Saran yang diberikan adalah rumusan Pasal 22 UU Antimonopoli direvisi menjadi yakin “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender”. Penggunaan kata “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” tidak perlu dicantumkan, karena KPPU akan kesulitan membuktikan unsur tersebut. Kata tersebut mengandung pendekatan *rule of reason*, dimana persyaratan pendekatan *rule of reason* diawali dengan pengukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait. Dan secara logika, tidak ada kemungkinan bahwa persekongkolan tender tidak akan mengakibatkan persaingan usaha yang sehat, dan dapat dipastikan bahwa apabila terjadi persekongkolan tender, maka pasti akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci : persekongkolan tender

ROLE OF THE JUDGE'S DECISION ON TENDER CONSPIRACY CASE IN CASE PT. INDOMOBIL INTERNATIONAL SUCCESS AND PT. PERTAMINA

Supriyanto

Abstrak

This study was conducted to determine and assess the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in proving the existence of bid rigging shares. Indomobil Sukses International and the case of sale or divestiture tankers (VLCC) owned by PT Pertamina (Persero). As well as determine the role of the District Court and judges of the Supreme Court against the decision of conspiracy tender case PT. Indomobil Sukses Internasional and PT. Pertamina. The theory used in this research is the theory of the state law, the state is a state law that uphold the supremacy of the law to uphold truth and justice, and there is no power which is not accounted for. The method used is a normative juridical research, the study of documents with the use of secondary data, which qualified on primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.

The results of this study are formulated Council of the Commission in the case of the sale of shares PT.IMSI and the Commission Council in case the divestment of VLCC PT.Pertamina both decided that businesses found to have violated Article 22 of the Antimonopoly Law. case PT.IMSI stock sales and divestment case VLCC PT. Pertamina, it can be concluded that the role of the District Court against the two cases are not only examining the substance / principal case. From the aspect of legal reasoning Antimonopoly Law Judges interpret as limitative, and also refers to the provisions of the purchase agreement were set in BW. Whereas in the case of divestment VLCC PT. Pertamina, the judges equate proving the element of "discrimination" in Article 19 paragraph d and the element of "conspiring" in Article 22 of the Antimonopoly Law. So is the case with elements of proof "resulting in unfair competition", under Article 19 letter d and Article 22 of the Antimonopoly Law. Advice given is the formulation of Article 22 of the Antimonopoly Law was revised to believe "Businesses are prohibited from conspiring with others to govern the tender". The use of the word "which may result in unfair competition" are necessary, because the Commission would have difficulty proving that element. The word contains a rule of reason approach, where the requirements of the rule of reason approach begins with the measurement of market share and forms related markets. And logically, there is no possibility that the tender conspiracy will not lead to healthy competition, and it is certain that in case of bid rigging, it will inevitably result in unfair business competition.

Keywords: bid rigging

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada ;

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
6. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan perhatian yang lebih selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik atau saran dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis sendiri.

Seiring dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, penulis berdoa semoga amal baik Bapak/Ibu serta dorongan dan motivasi keluarga diberkati dan dibalas Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 19 Desember 2015

Penulis,



Supriyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
I.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PEMBUKTIAN PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (PKPU).....	21
II.1 Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	21
II.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	30
II.3 Pengaturan Tentang Persengkokolan Tender Dalam UU Antimonopoli.....	36
II.4 Pembuktian Persengkokolan Tender Terhadap Perkara PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina Persero.....	44
II.5 Perkara No.07/KPPU-L/2004 tentang Divestasi Dua Kapal Tanker VLCC PT.Pertamina.....	51
II.6 Analisa Pembuktian Persekongkolan Tender Terhadap PT.Indomobil Sukses Internasional dan PT.Pertamina(Persero).....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
III.1 Sifat Penelitian.....	61
III.2 Sumber Data.....	61
III.3 Metode Pendekatan.....	62
BAB IV PERANAN HAKIM PENGADILAN DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER.....	63
IV.1 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Upaya Hukum Keberatan.....	63
IV.2 Legal Reasoning Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Perkara PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina(Persero).....	67
IV.3 Peranan Hakim Mahkamah Agung Dalam Upaya Kasasi.....	79
IV.4 Kearifan Hakim dan Kesadaran Masyarakat.....	89

BAB V PENUTUP.....	93
V.1 Kesimpulan.....	93
V.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
RIWAYAT HIDUP	